

Geopolitik Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga keamanan laut

Ahmad Rafi Rafiuddin

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ahmdraffi556@gmail.com

Kata Kunci:

Geopolitik, negara maritim, keamanan laut, wawasan nusantara, Indonesia

Keywords:

Geopolitics, maritime state, maritime security, archipelago insight, Indonesia

ABSTRAK

Geopolitik Indonesia sebagai negara maritim merupakan elemen strategis yang sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan serta keamanan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki letak geografis yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya jalur penting dalam arus perdagangan dan pelayaran internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep geopolitik Indonesia yang berlandaskan Wawasan Nusantara, mengidentifikasi berbagai ancaman serta tantangan di bidang keamanan laut, dan menganalisis strategi serta

kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas wilayah perairan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi beragam ancaman maritim, seperti praktik penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, serta pelanggaran batas wilayah laut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat peran TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, serta mengacu pada kerangka hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea. Selain itu, strategi lain yang dilakukan mencakup peningkatan kerja sama internasional, modernisasi alat utama sistem persenjataan, serta pemanfaatan teknologi di bidang kemaritiman.

ABSTRACT

Indonesia's geopolitics as a maritime state constitutes a crucial strategic aspect in maintaining national sovereignty and security. As the world's largest archipelagic country, Indonesia is geographically positioned between Asia and Australia, and lies between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, making it a vital route for international trade and shipping. This study aims to analyze Indonesia's geopolitical concept based on Wawasan Nusantara, identify maritime security threats and challenges, and examine strategies and policies implemented to maintain stability in its territorial waters. This research employs a qualitative approach using literature review from various academic and policy sources. The findings indicate that Indonesia faces multiple maritime threats, including illegal fishing, smuggling, human trafficking, and violations of maritime boundaries. To address these challenges, the government has strengthened the roles of Indonesian Navy and Indonesian Maritime Security Agency, while also adhering to international legal frameworks such as the United Nations Convention on the Law of the Sea. Additional strategies include enhancing international cooperation, modernizing defense equipment, and utilizing maritime surveillance technology. Therefore, strengthening Indonesia's maritime geopolitics requires an integrated and sustainable approach to safeguard sovereignty, security, and national prosperity.



Pendahuluan

Geopolitik kemaritiman Indonesia merupakan analisis strategis yang bertumpu pada fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan skala terbesar di dunia. Wilayahnya terdiri atas ribuan pulau yang membentang luas dari ujung barat hingga timur, dengan dominasi kawasan perairan yang melampaui luas daratan. Dalam konteks ini, laut tidak lagi dipahami sebagai unsur tambahan, melainkan sebagai fondasi utama yang membentuk dinamika kehidupan nasional. Konsekuensinya, ruang darat, laut, dan udara Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan terintegrasi, sehingga aspek keamanan maritim menjadi komponen krusial dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara secara menyeluruh (Yudhiya, 2025).

Posisi geografis Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap peran geopolitiknya di tingkat internasional. Terletak di persilangan dua benua Asia dan Australia serta di antara dua samudra besar, yakni Hindia dan Pasifik, Indonesia berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan pelayaran dan perdagangan dunia (Faslah, 2024). Keberadaan jalur-jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, menjadikan wilayah ini sebagai koridor vital yang dilalui arus kapal dagang dari berbagai negara. Oleh sebab itu, kondisi keamanan dan stabilitas perairan Indonesia tidak hanya menentukan kepentingan nasional, tetapi juga turut memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi serta keamanan global secara luas (Nashir, 2024).

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, baik dari sektor perikanan, energi, maupun pariwisata bahari. Laut Indonesia menyimpan kekayaan hayati yang melimpah dan menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat pesisir. Namun, potensi tersebut juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Berbagai ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan manusia, perompakan, hingga pelanggaran batas wilayah sering terjadi di perairan Indonesia. Ancaman-ancaman ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kedaulatan negara (Nadhifah, 2025).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peran institusi seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan instansi terkait lainnya, juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Tidak kalah penting, pemanfaatan teknologi modern seperti sistem pemantauan maritim dan satelit juga menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah laut.

Aspek hukum internasional juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah laut. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola wilayah lautnya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dengan adanya kerangka hukum ini, Indonesia memiliki legitimasi internasional dalam menjaga

kedaulatan dan menindak pelanggaran di wilayah perairannya. Namun demikian, implementasi hukum tersebut memerlukan kapasitas penegakan yang kuat serta kerja sama internasional untuk menangani kejahatan lintas negara yang semakin kompleks (Farhan, 2025).

Geopolitik maritim Indonesia juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada poros maritim dunia. Konsep ini menempatkan laut sebagai masa depan bangsa, baik dari sisi ekonomi, pertahanan, maupun diplomasi. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan konektivitas antar pulau, serta penguatan budaya maritim masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan laut. Tanpa kesadaran kolektif akan pentingnya laut, upaya menjaga keamanan maritim akan sulit mencapai hasil yang optimal (Yani & Montratama, 2015). Berdasarkan latar belakang bahwasannya geopolitik Indonesia sebagai negara maritim menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Keamanan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan guna memastikan bahwa wilayah laut Indonesia tetap aman, berdaulat, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas kawasan dan global.

Pembahasan

Konsep Geopolitik Indonesia dan Wawasan Maritim

Konsep geopolitik Indonesia pada hakikatnya berangkat dari pemahaman terhadap kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik khas dan berbeda dibandingkan negara kontinental. Dalam kerangka tersebut, Wawasan Nusantara dijadikan sebagai landasan utama dalam melihat wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara tidak hanya berperan sebagai doktrin geopolitik, tetapi juga sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan nasional yang mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan daerah maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, laut tidak lagi dipandang sebagai pemisah antar pulau, melainkan sebagai media penghubung yang memperkuat integrasi nasional (Akmaliza et al., 2022).

Laut memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai media transportasi, sumber daya ekonomi, maupun sebagai ruang pertahanan. Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau, seperti pada era kerajaan maritim, sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan menguasai wilayah laut. Oleh karena itu, penguatan wawasan maritim menjadi penting untuk mengembalikan orientasi proses pembangunan nasional yang telah berjalan hingga saat ini cenderung berfokus pada daratan. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menempatkan sektor kelautan sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional.

Posisi Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menempatkan Indonesia sebagai kawasan strategis dalam jalur lalu lintas internasional. Posisi tersebut menjadikan

Indonesia memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan global, penyaluran energi, dan perpindahan manusia antarnegara. Konsekuensinya, stabilitas keamanan wilayah Indonesia, khususnya di sektor maritim, memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan bahkan global. Oleh karena itu, geopolitik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan internasional dan kepentingan global yang beririsan di wilayah perairannya.

Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan manifestasi dari kesadaran geopolitik tersebut. Gagasan ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang tidak hanya berperan sebagai jalur lintasan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengamanan laut internasional. Konsep ini mencakup beberapa pilar utama, antara lain pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta penguatan pertahanan dan keamanan laut (Prakoso et al., 2023). Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelautannya sekaligus menjaga kedaulatan wilayahnya dari berbagai ancaman.

Wawasan maritim juga menuntut adanya perubahan paradigma dalam melihat laut sebagai ruang hidup (living space) yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Laut tidak hanya dipahami sebagai sumber kekayaan alam, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang harus dikelola secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran masyarakat pesisir, nelayan, serta pelaku ekonomi maritim lainnya menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi geopolitik maritim Indonesia (Ramadhan, 2024). Konsep geopolitik Indonesia yang berlandaskan wawasan nusantara dan diperkuat oleh orientasi sebagai negara maritim memberikan arah yang jelas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut. Pendekatan ini menuntut sinergi antara kebijakan nasional, kesadaran masyarakat, serta kerja sama internasional agar Indonesia mampu memanfaatkan posisi strategisnya secara optimal sekaligus menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang terus berkembang.

Ancaman dan tantangan keamanan laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang kompleks dalam menjaga keamanan maritimnya. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat tradisional seperti pelanggaran kedaulatan wilayah, tetapi juga berkembang dalam bentuk kejahatan lintas negara yang semakin terorganisir dan canggih. Salah satu ancaman utama adalah praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut serta kesejahteraan nelayan lokal. Selain itu, praktik penyelundupan barang ilegal, seperti narkoba, senjata, dan komoditas terlarang lainnya, menjadi tantangan serius karena memanfaatkan celah pengawasan di wilayah laut yang luas (Zuhroh et al., 2024).

Ancaman lain yang tidak kalah penting adalah perdagangan manusia (human trafficking) yang sering memanfaatkan jalur laut sebagai rute utama. Indonesia, yang memiliki banyak pelabuhan kecil dan wilayah perairan terpencil, menjadi titik rawan dalam aktivitas ini. Di samping itu, perompakan dan pembajakan kapal juga masih

menjadi isu keamanan di beberapa jalur strategis, khususnya di kawasan selat malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Intensitas lalu lintas kapal yang tinggi di kawasan tersebut membuka peluang terjadinya tindak kriminal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional (Sartika & Burhanuddin, 2023).

Selain ancaman non-tradisional, indonesia juga menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing. Pelanggaran ini sering kali terjadi di wilayah perbatasan dan zona ekonomi eksklusif (zee), yang berpotensi memicu konflik antarnegara jika tidak ditangani dengan baik. Kondisi ini menuntut kesiapan aparat keamanan laut dalam melakukan patroli, pengawasan, serta penegakan hukum secara tegas dan terukur. Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah armada patroli, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum meratanya teknologi pengawasan maritim.

Tantangan lain yang dihadapi adalah luasnya wilayah laut indonesia yang mencapai lebih dari dua pertiga total wilayah negara. Luasnya wilayah ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak mudah dan membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi anggaran, personel, maupun teknologi. Selain itu, kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dengan banyak jalur laut kecil turut menyulitkan proses pengawasan secara menyeluruh. Dalam situasi ini, celah keamanan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal (Amin, 2022).

Koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan di laut juga menjadi tantangan tersendiri. Terdapat beberapa lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengamanan laut, namun belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Hal ini terkadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya efektivitas dalam penanganan kasus di lapangan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga guna menciptakan sistem keamanan laut yang terpadu dan efisien. Jadi, ancaman dan tantangan keamanan laut indonesia tidak hanya bersifat multidimensional, tetapi juga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya penanganannya tidak cukup hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga harus melibatkan aspek hukum, ekonomi, teknologi, serta kerja sama internasional untuk menciptakan keamanan maritim yang berkelanjutan.

Strategi Dan Kebijakan Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Laut

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di wilayah maritim, indonesia telah merumuskan sejumlah strategi dan kebijakan untuk menjaga keamanan laut secara komprehensif. Salah satu langkah utama adalah memperkuat peran institusi pertahanan dan keamanan laut, seperti tentara nasional indonesia angkatan laut dan badan keamanan laut republik indonesia. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam melakukan patroli, pengawasan, serta penegakan hukum di wilayah perairan indonesia. Tni al berfokus pada aspek pertahanan negara, sementara bakamla berperan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut melalui fungsi coast guard (Gunarya, 2025).

Selain penguatan kelembagaan, indonesia juga mengacu pada kerangka hukum internasional dalam pengelolaan wilayah lautnya, yaitu Melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), ditetapkan suatu dasar hukum yang kuat

dan sistematis dalam pengaturan hukum laut internasional. Dengan meratifikasi UNCLOS, Indonesia memiliki legitimasi yang kuat dalam menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah perairannya, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) (Fathullah et al., n.d.).

Strategi lain yang dilakukan meliputi penguatan kerja sama internasional, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. Kolaborasi ini menjadi krusial dalam menangani kejahatan lintas negara yang tidak dapat diatasi secara sepihak. Indonesia secara aktif menjalin kemitraan dengan negara-negara tetangga melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan di bidang keamanan maritim. Upaya tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan kawasan.

Di bidang pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi bagian penting dalam strategi keamanan laut. Pengadaan kapal patroli modern, sistem radar, serta teknologi pemantauan berbasis satelit dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah laut. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem monitoring lalu lintas kapal (vessel traffic system) dan satelit maritim, juga berperan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan secara lebih cepat dan akurat (Fazri, 2025). Pemerintah juga mengembangkan kebijakan nasional berbasis kemaritiman yang menempatkan laut sebagai fokus utama pembangunan. Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas antar pulau, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan memperkuat aspek ekonomi dan sosial di wilayah maritim, diharapkan keamanan laut dapat terjaga secara berkelanjutan karena didukung oleh kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Strategi dan kebijakan Indonesia dalam menjaga keamanan laut mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Kombinasi antara kekuatan pertahanan, penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pembangunan berbasis kemaritiman menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah laut Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang (Sochfan et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Geopolitik Indonesia sebagai negara maritim menempatkan sektor kelautan sebagai unsur yang sangat strategis dalam upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa. Berpijak pada konsep Wawasan Nusantara, Indonesia memandang wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis dalam dinamika global. Meskipun demikian, berbagai ancaman seperti praktik penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, serta pelanggaran batas wilayah menunjukkan bahwa keamanan maritim masih menghadapi tantangan yang signifikan, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Diperlukan penguatan strategi nasional melalui peningkatan kapasitas lembaga seperti tentara nasional Indonesia angkatan laut dan badan keamanan laut Republik Indonesia, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi modern

dalam pengawasan maritim. Selain itu, kerja sama internasional dan implementasi hukum laut seperti united nations convention on the law of the sea perlu terus diperkuat. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan pembangunan berbasis kemaritiman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya laut, sehingga keamanan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen bangsa.

Daftar Pustaka

- Akmaliza, A., et al. (2022). Geopolitik Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92–109. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.217>
- Amaliya Nadhifah. (2025). Tata kelola kedaulatan laut Indonesia sebagai negara maritim. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 307–311.
- Amin, S. (2022). Modul geografi regional [Unpublished teaching module]. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. <https://repository.uin-malang.ac.id/13154/>
- Fathullah, A. N., Rahmi, D. F., & Ghonia, N. (2025). Peran Indonesia dalam implementasi hukum internasional untuk melindungi kepentingan nasional di wilayah pesisir: Analisis terhadap pengaruh dan kontribusi UNCLOS. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/42283>
- Farhan, M. (2025). Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dalam pengaturan lalu lintas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. *UNES Law Review*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2447>
- Faslah, R. (2024). Identitas nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gunarya, A. L. (2025). Strategi geopolitik Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 762–770. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nashir, A. K. (2024). Kepentingan dan posisi strategis Indonesia dalam peta geopolitik Indo-Pasifik. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 636–655. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.12>
- Prakoso, L. Y., et al. (2023). Kebijakan poros maritim dunia dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3305
- Ramdhan, M. (2024). Teknologi geospasial pesisir dan kelautan. ResearchGate.
- Ray Muhammad Fazri. (2025). Geopolitik dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 1480–1486.
- Sartika, & Burhanuddin, A. (2023). Perdagangan manusia (human trafficking) transnasional sebagai ancaman keamanan maritim di Selat Malaka. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 101–112. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1448>
- Sochfan, A., Darma, A. B., Santoso, W., Achnaf, M., & Herman, J. (2025). Pertahanan laut dan kedaulatan maritim: Strategi Indonesia dalam merespons pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 9(2), 218–231. <https://doi.org/10.52475/saintara.v9i2.441>

- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2015). Indonesia sebagai poros maritim dunia: Suatu tinjauan geopolitik. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 25
- Yudhiya, A. W. (2025). Peran geopolitik Indonesia dalam memperkuat kebijakan pertahanan dan diplomasi untuk menghadapi tantangan global. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(June), 2063–2073. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Zuhroh, N., Rahmaniah, A., Nulinnaja, R., & Achmad, I. L. R. (2024). Model implementasi moderasi beragama di daerah berbatasan sebagai upaya memperkuat patriotisme dan ketahanan nasional gen z (Research report). LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/22535/>